



COMMUNITY SERVICE
PARTICIPATION, COLLABORATION, AND SOCIAL INNOVATION



Optimalisasi Peran Praja dalam Manajemen Tanggap Darurat Pascabencana dan Kerja Bakti Sosial di Kabupaten Aceh Tamiang

Raden Rakha Manggala Putra¹, Heru Sulistyo², Rahmat Agung Tri Utomo³, Tedi Kusnadi⁴,
Suwaib Amiruddin⁵

1, 2, 3, 4, 5 **Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)**

*Corresponding Author: radenrakhaa2611@gmail.com

Citation: Aziz (2026). Optimalisasi Peran Praja dalam Manajemen Tanggap Darurat Pascabencana dan Kerja Bakti Sosial di Kabupaten Aceh Tamiang. *Journal of Community Service Based on Participation, Collaboration, and Social Innovation*, 10(4), xx–xx. <https://doi.org/0000-0000>

Published: May 29, 2026

ABSTRACT

Natural disasters not only cause physical destruction but also significantly affect social stability, environmental conditions, and governance activities, requiring integrated post-disaster recovery efforts (Coppola, 2015). Aceh Tamiang Regency, as an area vulnerable to flood-related disasters, requires a rapid, coordinated, and participatory recovery approach in accordance with collaborative disaster management principles (Law of the Republic of Indonesia Number 24 of 2007 concerning Disaster Management). This study aims to analyze the involvement of Praja in supporting emergency response and post-disaster recovery processes through environmental clean-up activities, drainage normalization, and social assistance for affected communities. The research employed a participatory approach through field observations, direct involvement in community service activities, inter-institutional coordination, and documentation during the Government Internship Program in Aceh Tamiang Regency. The findings indicate that Praja participation significantly contributed to accelerating environmental rehabilitation and restoring social conditions. Coordination among Praja, local government institutions, and communities reflected collaborative governance practices that strengthened collective decision-making and recovery effectiveness (Ansell & Gash, 2008). This study concludes that strengthening collaborative capacity, improving supporting facilities, and enhancing community empowerment are essential for establishing adaptive, participatory, and sustainable post-disaster recovery systems and strengthening community resilience (Aldrich & Meyer, 2015).

Keywords: Praja involvement; emergency response; post-disaster recovery; collaborative governance; community resilience.

ABSTRAK

Bencana alam tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik, tetapi juga berdampak pada stabilitas sosial, kondisi lingkungan, dan aktivitas pemerintahan sehingga memerlukan upaya pemulihan pascabencana yang terintegrasi (Coppola, 2015). Kabupaten Aceh Tamiang sebagai wilayah yang rentan terhadap bencana banjir membutuhkan pendekatan pemulihan yang cepat, terkoordinasi, dan partisipatif sesuai prinsip penanggulangan bencana berbasis kolaborasi (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007). Penelitian ini bertujuan menganalisis keterlibatan Praja dalam mendukung tanggap darurat dan proses pemulihan pascabencana melalui kegiatan pembersihan lingkungan, normalisasi drainase, dan bantuan sosial kepada masyarakat terdampak. Penelitian menggunakan pendekatan partisipatif melalui observasi lapangan, keterlibatan langsung dalam kegiatan pengabdian masyarakat, koordinasi antarlembaga, serta dokumentasi selama Program Magang Pemerintahan di Kabupaten Aceh Tamiang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi Praja berkontribusi signifikan terhadap percepatan rehabilitasi lingkungan dan pemulihan kondisi sosial masyarakat. Koordinasi antara Praja, pemerintah daerah, dan masyarakat mencerminkan penerapan tata kelola kolaboratif yang mendukung pengambilan keputusan bersama dan efektivitas pemulihan (Ansell & Gash, 2008). Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kapasitas kolaboratif, peningkatan fasilitas

pendukung, dan pemberdayaan masyarakat diperlukan untuk membangun sistem pemulihan pascabencana yang adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan serta memperkuat ketahanan masyarakat (Aldrich & Meyer, 2015).

Kata kunci: keterlibatan praja; tanggap darurat; pemulihan pascabencana; tata kelola kolaboratif; ketahanan masyarakat.

INTRODUCTION

Bencana alam merupakan salah satu peristiwa yang memiliki dampak multidimensional karena tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik terhadap infrastruktur dan lingkungan, tetapi juga memengaruhi kondisi sosial, ekonomi, kesehatan masyarakat, hingga tata kelola pemerintahan di wilayah terdampak. Dalam perspektif manajemen kebencanaan modern, bencana dipandang sebagai kondisi yang dapat mengganggu keberlangsungan sistem sosial masyarakat sehingga membutuhkan respons yang terencana, terkoordinasi, dan berkelanjutan (Coppola, 2015). Penanganan pascabencana tidak cukup hanya berfokus pada pemulihan fisik semata, tetapi juga harus diarahkan pada upaya pemulihan kapasitas sosial masyarakat agar dapat kembali menjalankan fungsi kehidupannya secara normal.

Indonesia merupakan negara dengan tingkat kerentanan bencana yang relatif tinggi akibat karakteristik geografis, geologis, hidrologis, dan klimatologis yang kompleks. Posisi Indonesia pada kawasan cincin api dunia (*ring of fire*) menyebabkan tingginya potensi kejadian bencana seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, hingga bencana hidrometeorologi lainnya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana). Kondisi tersebut menjadikan penguatan kapasitas penanggulangan bencana sebagai agenda penting dalam sistem pemerintahan nasional maupun daerah.

Dalam beberapa tahun terakhir, tren peningkatan kejadian bencana hidrometeorologi menunjukkan kecenderungan yang semakin signifikan. Banjir menjadi salah satu jenis bencana yang paling sering terjadi dan menimbulkan dampak luas terhadap aktivitas sosial masyarakat. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa kerusakan fasilitas publik dan lingkungan permukiman, tetapi juga gangguan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, kesehatan lingkungan, serta pelayanan pemerintahan. Pascaterjadinya bencana, persoalan yang umumnya muncul adalah tumpukan sedimen lumpur, tersumbatnya saluran drainase, kerusakan sarana publik, serta menurunnya kualitas sanitasi lingkungan yang dapat memicu berbagai permasalahan lanjutan (BNPB., 2025).

Pemulihan pascabencana pada hakikatnya merupakan proses rehabilitasi yang membutuhkan sinergi berbagai pihak. Paradigma penanggulangan bencana saat ini telah mengalami pergeseran dari pendekatan yang bersifat *government-centered* menuju pendekatan *governance-centered* yang menekankan keterlibatan multipihak dalam proses penyelenggaraan kebijakan publik (Ansell & Gash, 2008). Pendekatan tersebut menempatkan pemerintah, masyarakat, organisasi sosial, relawan, serta unsur pendukung lainnya dalam posisi yang setara sebagai aktor pemulihan wilayah terdampak. Konsep *collaborative governance* menekankan bahwa keberhasilan suatu program publik sangat dipengaruhi oleh kualitas koordinasi dan kerja sama antaraktor yang terlibat.

Selain koordinasi kelembagaan, faktor lain yang memiliki peran penting dalam proses pemulihan pascabencana adalah modal sosial masyarakat. Modal sosial merupakan kumpulan nilai, kepercayaan, solidaritas, dan jaringan sosial yang mampu memperkuat kemampuan masyarakat dalam menghadapi situasi krisis (Putnam, 1993). Masyarakat yang memiliki tingkat solidaritas tinggi cenderung lebih cepat bangkit dan beradaptasi setelah mengalami bencana dibandingkan masyarakat dengan tingkat partisipasi sosial yang rendah. Penelitian menunjukkan bahwa ketahanan sosial masyarakat pascabencana memiliki hubungan erat dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam proses rehabilitasi lingkungan (Aldrich & Meyer, 2015).

Dalam konteks pelaksanaan pemerintahan, keterlibatan unsur pendidikan kedinasan melalui kegiatan magang pemerintahan juga memiliki peran strategis dalam mendukung proses pemulihan wilayah terdampak. Kehadiran Praja dalam situasi pascabencana tidak hanya menjadi bagian dari implementasi pendidikan lapangan, tetapi juga merupakan bentuk pengabdian nyata kepada masyarakat melalui pelaksanaan fungsi pelayanan, perlindungan, dan pemberdayaan sosial. Keterlibatan Praja dalam kegiatan pembersihan lingkungan, pengangkutan material lumpur, normalisasi drainase, hingga kerja bakti sosial menjadi manifestasi dari praktik pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat pada situasi darurat.

Kabupaten Aceh Tamiang merupakan salah satu wilayah yang memiliki kerentanan terhadap bencana banjir akibat karakteristik geografis yang dipengaruhi oleh aliran sungai dan kondisi lingkungan sekitar. Dampak bencana yang terjadi tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga memengaruhi keberlangsungan pelayanan publik dan kondisi lingkungan permukiman. Berdasarkan pelaksanaan Program Magang

Copyright © 2025 by Author/s. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Pemerintahan Pratama, ditemukan berbagai kondisi pascabencana berupa penumpukan material lumpur, saluran drainase yang mengalami penyumbatan, serta kerusakan lingkungan yang memerlukan penanganan cepat dan terintegrasi.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan upaya kolaboratif yang mampu mempercepat proses rehabilitasi wilayah terdampak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis keterlibatan Praja dalam mendukung proses tanggap darurat dan pemulihan pascabencana melalui kegiatan pembersihan lingkungan, normalisasi drainase, serta dukungan sosial kepada masyarakat terdampak di Kabupaten Aceh Tamiang. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan studi pemerintahan, khususnya terkait penguatan tata kelola kolaboratif dalam penanggulangan dan pemulihan pascabencana.

METHODOLOGY

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif (*participatory approach*), yaitu pendekatan yang menempatkan masyarakat dan seluruh pihak terkait sebagai subjek utama dalam setiap tahapan kegiatan. Pendekatan partisipatif dipilih karena mampu mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses identifikasi permasalahan, pelaksanaan kegiatan, hingga evaluasi hasil program, sehingga meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program yang dijalankan (Krisnanda, et al., 2026). Dalam konteks penanggulangan bencana, pendekatan partisipatif memiliki peran strategis karena proses rehabilitasi wilayah terdampak tidak dapat dilakukan secara sektoral, melainkan membutuhkan keterlibatan berbagai unsur secara kolaboratif (Aldrich & Meyer, 2015).

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam rangka Program Magang Pemerintahan Pratama di Kabupaten Aceh Tamiang dengan fokus kegiatan pada dukungan Praja terhadap proses tanggap darurat dan pemulihan pascabencana. Sasaran kegiatan meliputi masyarakat terdampak, lingkungan permukiman, fasilitas publik, serta infrastruktur dasar yang mengalami gangguan fungsi akibat bencana banjir. Pelaksanaan kegiatan berorientasi pada pemulihan kondisi lingkungan dan penguatan kembali aktivitas sosial masyarakat pascabencana melalui kegiatan rehabilitasi berbasis gotong royong.

Metode pelaksanaan kegiatan disusun secara sistematis melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Observasi dan Identifikasi Permasalahan

Tahap awal dilakukan melalui observasi lapangan untuk mengidentifikasi kondisi wilayah terdampak bencana, tingkat kerusakan lingkungan, kondisi infrastruktur publik, serta kebutuhan prioritas masyarakat. Observasi lapangan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung untuk memperoleh gambaran faktual mengenai situasi yang terjadi sehingga keputusan intervensi dapat dilakukan secara tepat sasaran (Creswell, 2014). Pada tahap ini dilakukan identifikasi titik-titik prioritas yang mengalami sedimentasi lumpur, kerusakan lingkungan, serta saluran drainase yang mengalami penyumbatan akibat material pascabencana.

Tahap identifikasi permasalahan menjadi bagian penting dalam proses penanggulangan bencana karena penanganan yang efektif memerlukan pemetaan kebutuhan serta penentuan skala prioritas berdasarkan kondisi riil di lapangan (Coppola, 2015). Hasil observasi menunjukkan adanya akumulasi material lumpur pada lingkungan permukiman warga, tersumbatnya saluran drainase, serta terganggunya aksesibilitas pada beberapa fasilitas publik.

2. Tahap Koordinasi dan Perencanaan Kegiatan

Tahapan selanjutnya dilakukan melalui koordinasi antara Praja, pemerintah daerah, perangkat kampung, instansi terkait, dan masyarakat. Kegiatan koordinasi bertujuan untuk menyelaraskan tujuan, menentukan lokasi prioritas, mengatur pembagian tugas, serta mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Koordinasi antaraktor memiliki peranan penting dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan publik karena keberhasilan program kolaboratif dipengaruhi oleh kualitas komunikasi dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan (Ansell & Gash, 2008).

Pada tahap ini dilakukan penentuan jadwal pelaksanaan, pembagian kelompok kerja lapangan, serta penyusunan strategi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi. Pendekatan koordinatif tersebut digunakan untuk meminimalkan tumpang tindih pelaksanaan kegiatan dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya.

3. Tahap Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Pascabencana

Tahap implementasi dilakukan melalui keterlibatan langsung Praja dalam berbagai kegiatan rehabilitasi lingkungan pascabencana. Bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi pembersihan lingkungan, pengangkatan lumpur, normalisasi drainase, pembersihan fasilitas umum, bantuan pembersihan rumah masyarakat terdampak, serta pelaksanaan kerja bakti massal. Kegiatan berbasis gotong royong dipilih karena mampu meningkatkan solidaritas sosial sekaligus mempercepat proses pemulihan lingkungan masyarakat (Putnam, 1993).

Selain sebagai bentuk dukungan fisik terhadap proses rehabilitasi wilayah, keterlibatan langsung Praja juga menjadi implementasi fungsi pelayanan publik dan perlindungan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penanggulangan bencana pada prinsipnya menempatkan pemerintah dan seluruh unsur pendukung sebagai aktor yang bertanggung jawab terhadap perlindungan masyarakat secara terpadu (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana).

4. Tahap Dokumentasi dan Evaluasi Kegiatan

Tahapan akhir dilakukan melalui proses dokumentasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Dokumentasi dilakukan untuk merekam seluruh aktivitas lapangan sebagai bentuk pelaporan dan bahan analisis pelaksanaan kegiatan. Sementara evaluasi dilakukan untuk menilai tingkat efektivitas pelaksanaan program berdasarkan perubahan kondisi lingkungan, keterlibatan masyarakat, dan tingkat ketercapaian kegiatan.

Evaluasi merupakan komponen penting dalam kegiatan pengabdian karena dapat digunakan untuk mengidentifikasi hambatan, mengukur keberhasilan program, serta menyusun rekomendasi untuk penyempurnaan pelaksanaan kegiatan pada masa mendatang (Creswell, 2014). Melalui evaluasi tersebut diharapkan kegiatan pengabdian tidak hanya menghasilkan dampak jangka pendek berupa pemulihan fisik wilayah, tetapi juga mampu memperkuat kapasitas sosial masyarakat dalam menghadapi potensi bencana di masa mendatang.

RESULTS & DISCUSSION

Keterlibatan Praja dalam Pemulihan Infrastruktur dan Penguatan Solidaritas Sosial Pascabencana di Kabupaten Aceh Tamiang

Pelaksanaan kegiatan pengabdian dalam Program Magang Pemerintahan Pratama di Kabupaten Aceh Tamiang menunjukkan bahwa keterlibatan Praja memiliki kontribusi strategis dalam mendukung proses tanggap darurat dan pemulihan pascabencana melalui pendekatan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan unsur pendukung lainnya. Dalam perspektif administrasi publik modern, penanganan pascabencana tidak hanya diarahkan pada pemulihan fisik infrastruktur, tetapi juga penguatan kembali kapasitas sosial masyarakat melalui tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) yang menekankan koordinasi antarpemangku kepentingan (Ansell & Gash, 2008).

Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa program pengabdian yang dilakukan memiliki orientasi pada percepatan rehabilitasi wilayah melalui pemulihan aksesibilitas publik, normalisasi infrastruktur dasar, serta penguatan semangat gotong royong masyarakat. Urgensi pelaksanaan program ini didasarkan pada kebutuhan percepatan pemulihan infrastruktur publik, mitigasi risiko kesehatan lingkungan, pemulihan kelayakan hunian masyarakat, serta penguatan sinergi antara aparatur pemerintahan dan masyarakat terdampak.

Program pengabdian yang dilaksanakan berfokus pada rehabilitasi infrastruktur publik yang mengalami gangguan fungsi akibat dampak bencana. Kegiatan ini mencakup pengangkatan lumpur, normalisasi drainase, pembersihan median jalan, dan perbaikan estetika fasilitas publik melalui pengecatan ulang sarana umum. Program tersebut dilakukan untuk mempercepat pemulihan kondisi lingkungan serta mengembalikan fungsi pelayanan publik secara optimal.

Pembersihan Lumpur Pascabencana

Kegiatan pengangkatan lumpur dilakukan pada wilayah pemukiman warga dan akses jalan utama yang mengalami sedimentasi pascabanjir. Berdasarkan hasil observasi lapangan, material lumpur yang mengendap menimbulkan hambatan terhadap mobilitas masyarakat dan aktivitas sosial-ekonomi wilayah terdampak.

Kegiatan ini menghasilkan pemulihan akses transportasi masyarakat secara bertahap serta mengurangi hambatan fisik yang sebelumnya mengganggu aktivitas harian masyarakat. Dalam kajian manajemen bencana,

percepatan pemulihan infrastruktur dasar merupakan bagian penting dalam proses rehabilitasi karena berkaitan langsung dengan keberlanjutan aktivitas sosial masyarakat (Coppola, 2015).



Normalisasi Drainase

Normalisasi drainase dilakukan melalui pembersihan saluran air dari sedimentasi lumpur dan penumpukan sampah pascabencana. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi saluran air dan mencegah potensi genangan lanjutan yang dapat memicu banjir susulan.

Dalam perspektif mitigasi kebencanaan, pemeliharaan infrastruktur drainase memiliki fungsi preventif dalam mengurangi risiko kerusakan lingkungan di masa mendatang. Rehabilitasi sistem drainase yang dilakukan secara cepat dapat meminimalkan dampak lanjutan akibat gangguan aliran air (Coppola, 2015).





Pembersihan Median Jalan dan Pengecatan Fasilitas Publik

Selain fokus pada rehabilitasi infrastruktur dasar, kegiatan pengabdian juga diarahkan pada pemulihan estetika lingkungan publik melalui pembersihan median jalan dan pengecatan ulang fasilitas umum. Program ini dilakukan untuk mengembalikan kenyamanan visual serta meningkatkan kualitas lingkungan pascabencana.

Hasil kegiatan menunjukkan adanya perubahan kondisi lingkungan yang lebih bersih, tertata, dan representatif untuk mendukung aktivitas masyarakat serta pelayanan pemerintahan. Temuan ini sejalan dengan konsep rehabilitasi lingkungan yang menekankan pentingnya pengembalian fungsi sosial dan kenyamanan ruang publik pascabencana (Putnam, 1993).



Penguatan Solidaritas Sosial dan Kegiatan Kemasyarakatan

Selain kegiatan rehabilitasi fisik, program pengabdian juga diarahkan pada penguatan modal sosial melalui kegiatan kerja bakti dan bantuan langsung kepada masyarakat. Bentuk kegiatan meliputi pembersihan area kantor pemerintahan, bantuan pembersihan rumah warga terdampak, serta pelaksanaan bakti sosial kolaboratif antara Praja, instansi pemerintah, dan masyarakat.

Kegiatan bantuan langsung kepada masyarakat menunjukkan bahwa proses pemulihan pascabencana tidak hanya berkaitan dengan pemulihan fisik lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan penguatan aspek psikososial masyarakat. Modal sosial berupa rasa percaya, solidaritas, dan gotong royong menjadi faktor penting dalam mempercepat proses pemulihan masyarakat terdampak (Aldrich & Meyer, 2015).

Pelaksanaan kegiatan bakti sosial yang melibatkan berbagai aktor menunjukkan implementasi prinsip *collaborative governance*, di mana proses pemulihan dilakukan secara kolektif melalui koordinasi lintas sektor (Ansell & Gash, 2008). Pendekatan ini terbukti efektif dalam mempercepat normalisasi wilayah terdampak sekaligus memperkuat hubungan antara aparatur pemerintahan dan masyarakat.



Secara keseluruhan, hasil pengabdian menunjukkan bahwa keterlibatan Praja tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pemulihan infrastruktur publik, tetapi juga berperan dalam memperkuat solidaritas sosial masyarakat. Temuan ini menguatkan pandangan bahwa keberhasilan pemulihan pascabencana sangat dipengaruhi oleh kolaborasi multipihak, modal sosial masyarakat, serta efektivitas koordinasi pemerintahan (Aldrich & Meyer, 2015; Ansell & Gash, 2008).

Pembersihan Area Pemerintahan Istana Banua Raja sebagai Upaya Pemulihan Lingkungan Institusional

Selain pelaksanaan kegiatan pada wilayah permukiman masyarakat dan fasilitas publik umum, kegiatan pengabdian juga diarahkan pada pembersihan kawasan pemerintahan di lingkungan **Istana Banua Raja** sebagai bagian dari upaya pemulihan lingkungan institusional pascabencana. Kegiatan ini dilakukan karena kawasan pemerintahan memiliki fungsi strategis sebagai pusat aktivitas pelayanan, koordinasi, serta simbol tata kelola pemerintahan daerah yang harus tetap berada dalam kondisi representatif dan operasional.

Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa area sekitar lingkungan pemerintahan mengalami penumpukan material sisa bencana berupa lumpur, sampah, dan sedimen yang mengganggu estetika serta kenyamanan lingkungan kerja. Kondisi tersebut berpotensi menghambat aktivitas pelayanan pemerintahan apabila tidak segera dilakukan tindakan rehabilitasi. Dalam perspektif administrasi publik, kualitas lingkungan kerja pemerintahan memiliki keterkaitan dengan efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik karena lingkungan yang bersih dan tertata dapat meningkatkan produktivitas organisasi serta kenyamanan pelayanan kepada masyarakat (Dwiyanto, 2017).





Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan adanya perubahan kondisi lingkungan yang lebih bersih, tertata, dan kondusif bagi aktivitas pemerintahan. Selain mendukung pemulihan fungsi fisik kawasan pemerintahan, kegiatan tersebut juga memberikan dampak terhadap peningkatan semangat kolektif masyarakat dalam mendukung proses rehabilitasi wilayah pascabencana.

CONCLUSION

Pelaksanaan kegiatan pengabdian melalui Program Magang Pemerintahan Pratama di Kabupaten Aceh Tamiang menunjukkan bahwa keterlibatan Praja memiliki kontribusi signifikan dalam mendukung proses tanggap darurat dan pemulihan pascabencana melalui pendekatan kolaboratif berbasis partisipasi masyarakat. Kegiatan yang meliputi pembersihan lumpur pascabencana, normalisasi drainase, pembersihan fasilitas publik, bantuan pembersihan rumah warga, hingga pelaksanaan kerja bakti sosial terbukti memberikan dampak terhadap percepatan rehabilitasi lingkungan dan pemulihan aktivitas masyarakat. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pemulihan wilayah terdampak tidak hanya berkaitan dengan perbaikan fisik infrastruktur, tetapi juga mencakup penguatan fungsi sosial masyarakat secara berkelanjutan.

Hasil kegiatan juga menunjukkan bahwa keberhasilan rehabilitasi pascabencana dipengaruhi oleh sinergi antara pemerintah, Praja, dan masyarakat melalui pola koordinasi yang terintegrasi. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *collaborative governance* yang menekankan pentingnya kerja sama antarpemangku kepentingan dalam pelaksanaan kebijakan publik (Ansell & Gash, 2008). Selain itu, tingginya semangat gotong royong masyarakat selama proses rehabilitasi menunjukkan bahwa modal sosial memiliki peranan penting dalam mempercepat proses pemulihan wilayah terdampak (Putnam, 1993).

Meskipun pelaksanaan kegiatan masih menghadapi sejumlah hambatan berupa keterbatasan sarana pendukung, kondisi lingkungan pascabencana yang sulit dijangkau, serta partisipasi masyarakat yang belum merata pada tahap awal, kegiatan pengabdian ini membuktikan bahwa keterlibatan langsung Praja mampu menjadi katalisator dalam memperkuat solidaritas sosial dan meningkatkan efektivitas proses rehabilitasi. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa pembangunan sistem pemulihan pascabencana yang adaptif memerlukan integrasi antara rehabilitasi fisik, penguatan kapasitas sosial masyarakat, dan tata kelola kolaboratif yang berkelanjutan (Aldrich & Meyer, 2015; Coppola, 2015).

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, arahan, serta kontribusi selama pelaksanaan Program Magang Pemerintahan Pratama dan penyusunan artikel pengabdian ini. Secara khusus, ucapan terima kasih disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang beserta seluruh jajaran perangkat daerah dan aparatur kampung yang telah memberikan kesempatan, fasilitas, serta dukungan selama proses pelaksanaan kegiatan pengabdian di lapangan.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada dosen pembimbing, pembina lapangan, serta seluruh pihak institusi pendidikan yang telah memberikan bimbingan akademik dan arahan selama proses kegiatan berlangsung. Dukungan tersebut memiliki peranan penting dalam memperkuat kapasitas penulis, baik secara akademik maupun praktik lapangan dalam memahami implementasi tata kelola pemerintahan dan manajemen kebencanaan.

Penghargaan turut diberikan kepada masyarakat di Kabupaten Aceh Tamiang yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan kerja bakti dan pemulihan pascabencana. Tingginya semangat gotong royong dan solidaritas sosial masyarakat menjadi modal penting dalam mempercepat proses rehabilitasi wilayah terdampak. Partisipasi masyarakat merupakan elemen utama dalam memperkuat ketahanan sosial dan keberhasilan proses pemulihan pascabencana (Aldrich & Meyer, 2015).

Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh Praja dan rekan pelaksana kegiatan yang telah menunjukkan komitmen, kerja sama, dan dedikasi tinggi selama proses pengabdian. Kolaborasi multipihak yang terbangun selama kegiatan berlangsung menunjukkan bahwa keberhasilan program pemulihan pascabencana sangat dipengaruhi oleh sinergi antarpemangku kepentingan melalui pendekatan *collaborative governance* (Ansell & Gash, 2008).

REFERENCES

- Aldrich, D. P., & Meyer, M. A. (2015). Social Capital and Community Resilience. *American Behavioral Scientist*, 59(2), 254–269. <https://doi.org/10.1177/0002764214550299>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2016). *Risiko bencana Indonesia*. BNPB.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2024). *Indeks Risiko Bencana Indonesia*. BNPB.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2025). *Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI)*. BNPB.
- Coppola, D. P. (2015). *Introduction to international disaster management* (3rd ed.). Butterworth-Heinemann.
- John W. Creswell Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Agus Dwiyanto Dwiyanto, A. (2017). *Manajemen pelayanan publik: Peduli, inklusif, dan kolaboratif*. Gadjah Mada University Press.
- Miles B. Huberman Huberman, M. B., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). *Pedoman umum kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana daerah*. Kemendagri.
- Krisnanda, K., Widyastuti, W., & Nadia, L. P. (2026). Pelatihan manajemen pemasaran dan diversifikasi produk sebagai solusi peningkatan daya saing petani di tengah risiko gagal panen. *Jurnal Abdimas Madani dan Lestari*, 8(1), 41–50.
- Lexy J. Moleong Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Taliziduhu Ndraha Ndraha, T. (2015). *Kybernology: Ilmu pemerintahan baru*. Rineka Cipta.
- Riant Nugroho Nugroho, R. (2018). *Public policy: Dinamika kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan*. Elex Media Komputindo.
- Robert D. Putnam Putnam, R. D. (1993). *Making democracy work: Civic traditions in modern Italy*. Princeton University Press.
- Edi Suharto Suharto, E. (2017). *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat: Kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial*. Refika Aditama.
- Sugiyono Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana.
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
- United Nations Development Programme. (2017). *A resilience approach to development: Building resilience to disasters and crises*.
- United Nations Office for Disaster Risk Reduction. (2015). *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030*.
- Robert K. Yin Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Sage Publications.
- World Bank. (2010). *Natural hazards, unnatural disasters: The economics of effective prevention*. World Bank Publications.
- Raden Rakha Manggala Putra. (2026). *Laporan Magang Pemerintahan Pratama Kabupaten Aceh Tamiang*. Dokumen internal.